

Judul : DPR: Limbah Mineral Bisa Genjot Pendapatan Negara
Tanggal : Senin, 04 Oktober 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Butuh Regulasi Dan Investasi

DPR: Limbah Mineral Bisa Genjot Pendapatan Negara

Politisi Senayan melihat, pengelolaan limbah hasil tambang mineral belum optimal. Padahal, limbah mineral ini bisa menjadi *cuan* yang mendorong peningkatan pendapatan negara di sektor pertambangan.

ANGGOTA Komisi VII DPR Bambang Patjaya menjelaskan, sejatinya Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya mineral. Hanya saja, pengelolaannya masih dalam bentuk mineral utama, tidak sampai kepada mineral ikutan.

Dia mencontohkan, pertambangan timah di daerah pemilihan Bangka Belitung. Ketika timah ditambang, ada mineral (ikutan) lain yang didapat seperti monasit, ilmenite, zirkon dan rutil. "Ini barang sebenarnya bernilai tinggi. Cuma karena persoalan regulasi, teknologi serta investasi jadi tidak termanfaatkan sehingga hanya menjadi limbah," kata Bambang, tadi malam.

Mineral-mineral penting ini, lanjutnya, bertebaran di Babel karena tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal, mineral-mineral ikutan tersebut mengandung unsur atau bahan kimia berharga seperti Thorium yang merupakan bahan utama pembuatan nuklir.

"Tapi karena regulasi tidak jelas dan teknologi belum ada, akhirnya hanya menjadi limbah. Ini yang selama ini belum jelas, karena persoalan mineral ini

hanya kita bahas secara parsial," katanya.

Karena itu, jelas Bambang, pemanfaatan hilirisasi mineral ini mesti dituntaskan dengan menitikberatkan empat hal. Pertama, persoalan data. Selama ini masalah data ini tidak pernah klar, lantaran hanya berpatokan pada mineral utama.

"Indonesia katanya punya cadangan nikel sekian juta ton, punya timah sekian juta ton. Tapi data mineral ilmenite, monasit, zirkon, dan lainnya ini tidak ada. Ini sektor hulu yang harus diberesin," jelasnya.

Kedua, sambung politisi muda Partai Golkar ini, terkait regulasi. Selama ini, perizinan pertambangan hanya bertuju kepada mineral utama. Sementara mineral ikutan lainnya tidak diatur.

Persoalan ketiga yang tak kalah pentingnya adalah terkait teknologi. Yang menguasai teknologi pengolahan bahan mineral-mineral ikutan ini di belahan dunia sangat sedikit.

Dijelaskannya, untuk pengolahan mineral di timah ini teknologi yang digunakan sangat terbatas. Padahal di bahan limbah timah ini, terdapat terdapat

monasit yang di dalamnya terkandung 20-30 persen Thorium, bahan utama nuklir. Selain itu juga terdapat Rutil, di mana 75 persen merupakan titanium.

"Kalau di pasar bebas, harganya (rutil -red) Rp 2.000 per kilogram. Tapi oleh China, ini barang bisa menjadi sangat mahal karena hanya mereka yang memiliki teknologi ini," katanya.

Selama teknologi ini belum ada, maka bahan-bahan mineral yang sangat penting ini hanya menjadi bahan limbah di Indonesia.

Aspek terakhir yang tidak kalah pentingnya di sini adalah investasi. Masalah ini sudah teratasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, Komisi VII DPR juga tengah membentuk Panitia Peningkatan Pendapatan

Negara. Panitia ini spesifik membahas tentang potensi sektor Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM).

"Ini yang perlu kita duduk bersama, sehingga masalah mineral ini bukan hanya pengelolaan mineral utama saja. Tapi mineral ikutan lainnya yang sebenarnya *value*-nya luar biasa. Tapi karena teknologinya belum ada, hanya menjadi limbah," tegasnya. ■ KAL